

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

INTEGRASI NASIONAL

Dr. HUDAIDAH, M.Pd.,

DAFTAR ISI

INTEGRASI NASIONAL.....	3
A. Definisi Integrasi Nasional.....	3
B. Macam-Macam Integrasi.....	3
C. Integrasi Nasional Indonesia.....	5
D. Integrasi Nasional dan Kerjasama antar Golongan.....	8
E. Perwujudan Integrasi Nasional.....	8
F. Masalah Integrasi Nasional.....	9
G. Contoh Masalah Integrasi Bangsa.....	14
SOAL LATIHAN.....	22
DAFTAR PUSTAKA	

INTEGRASI NASIONAL

A. Definisi Integrasi

Secara etimologi, integrasi berasal dari kata latin *integrare* yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kemudian dari bentuk kata kerja itu dibentuk kata benda *integritas* yang artinya keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya, dari kata-kata *integritas* dibentuk kata sifat *integer*, artinya utuh. Oleh sebab itu, istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh (Hendropuspito dalam Depdikbud, 1997: 24).

(Menurut Widjaja dalam Depdikbud 1997: 24) integrasi adalah keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu sistem, dan bukan penyeragaman, namun merupakan hubungan satuan-satuan yang sedemikian rupa serta tidak merugikan masing-masing satuan. Yang baik saling mendukung satuan serta masih memiliki identitas masing-masing dan saling menguntungkan.

Dari beberapa definisi integrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah usaha-usaha untuk menyatukan unsur-unsur yang saling mendukung untuk menjadi suatu bentuk kesatuan yang utuh.

B. Macam-Macam Integrasi

1. Integrasi Kebudayaan

Pengertian integrasi dalam kebudayaan adalah proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional dari bangsa atau nasional Indonesia, dilihat dari aspek budaya, merupakan proses pembentukan kesatuan solidaritas kebangsaan, Kesatuan itu beranggotakan antara lain nasional-nasional lama (suku bangsa) yang berbeda budaya, yang mencapai keserasian dalam kehidupan masyarakat, dengan sejumlah peranan dan kedudukan Indonesia. Anggota masyarakat itu tidak harus terlepas dari keanggotaan nasional lama tersebut (Depdikbud 1996: 17).

(Koentjaraningrat dalam Depdikbud 1997: 25) menyebutkan bahwa integrasi mencakup aneka wama kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang antara lain mencakup masalah merubah prasangka etnis atau stereotipe etnik antara warga suku bangsa yang berlainan yang di dalam persaingannya mengejar kesempatan bekerja serta pendidikan yang terbatas sehingga dapat menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan.

2. Integrasi Sosial

(Suryaman dalam Depdikbud 1997:29) Di dalam integrasi sosial terkandung makna adanya proses saling mempengaruhi antara dua individu atau kelompok masyarakat melalui berbagai aktivitas di dalam situasi sosial tertentu. Proses integrasi yang dinamis melalui aktivitas sosial-ekonomi-budaya antar kelompok masyarakat menentukan jalannya proses integrasi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi antar kelompok masyarakat adalah:

a. Komunikasi.

Adanya komunikasi akan membuka kontak-kontak sosial yang merupakan proses saling mempengaruhi sehingga salah satu jalan menuju integrasi antara lain berupa faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.

b. Solidaritas kelompok.

Faktor ini merupakan bentuk interaksi sosial yang intensip serta membentuk struktur dan norma-norma kelompok, mengatur interaksi dan kegiatan kelompok dalam merealisasikan tujuan bersama serta menumbuhkan solidaritas antarkelompok masyarakat.

c. Budaya dan agama.

Melalui nilai-nilai budaya dan noma agama diharapkan dapat mempengaruhi pola tingkah laku manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap masyarakat. Di sini, integrasi dipengaruhi oleh unsur subyektif berupa perasaan dan pikiran terhadap kelompok lain yang wujud idealnya membuat kelompok budaya tertentu tidak suka terhadap kelompok budaya lain karena

tingkah laku sosial yang berbeda. Kecuali ditentukan oleh unsur tersebut maka integrasi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan perbedaan bahasa.

d. Daya tampung sosial

Setiap kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, ketrampilan, kebutuhan, dan aspirasi tidak selalu sama atau mempunyai proses integrasi untuk mewujudkan integrasi sosial-budaya.

3. Integrasi Nasional

integrasi nasional merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik itu, dari perjalanan dan pengalaman historis ini melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan sepenenderitaan. Perasaan sepenenderitaan ini yang melahirkan kesadaran terhadap identitas bangsa dan melahirkan hasrat untuk menciptakan kondisi tujuan bersama dan melahirkan negara yang merdeka (Depdikbud, 1996: 19).

Bilamana dia tidak berhasil mengadakan adaptasi berintegrasi terhadap perkembangan pembangunan dan lingkungan hidupnya, secara logis dia tidak akan mungkin memberikan partisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini akan membahayakan etnik lainnya, disamping menjadi beban bagi yang lainnya juga mengganggu kestabilan bersama (Depdikbud, 1996: 21).

C. Integrasi Nasional Indonesia

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.

Kodrat integrasi pada bangsa Indonesia, tercipta oleh kesadaran kebangsaan dan cita-cita perjuangan yang dibangun melalui gairah dan kehendak yang kuat dari kodrat keanekaragaman kehidupan bangsa Indonesia. Kodrat keanekaragaman kehidupan itulah yang membangun kehendak berintegrasi ke dalam satu kesatuan

bangsa, dan bercita-cita membangun satu kehidupan kebangsaan, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia (Mattulada dalam Depdikbud 1997: 24).

Bagi negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Indonesia, konsep integrasi sering digunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia dalam satu wawasan yang disebut dengan wawasan nusantara. Adanya beberapa suku-bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di satu pihak merupakan kebangsaan tersendiri karena memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat tinggi harganya. Namun, di sisi lain dengan banyaknya jumlah suku- bangsa yang ada merupakan sumber timbulnya konflik (Depdikbud 1997: 24).

Dalam kehidupan suatu suku-bangsa tertentu, seringkali dijumpai gambaran subyektif mengenai suku bangsa lain, baik yang bersifat positif maupun negatif. Akan tetapi tidak selamanya gambaran subyektif atau stereotipe etnik ini selalu merupakan gambaran yang negatif saja, melainkan ada kalanya berupa stereotipe etnik yang positif. Namun, dalam kenyataannya justru stereotipe etnik yang negatiflah yang sering muncul dan hal ini yang akan menghambat terwujudnya integrasi nasional (Depdikbud, 1997: 28).

Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa beruntung mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dilkarkan oleh para pemuda Indonesia pada tahun 1928. Hingga kini, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa persatuan oleh seluruh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia asli dengan cirinya tersendiri, dan berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Riau. Tercapainya kesepakatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bukan sesuatu yang dipahami dan diinterpretasikan secara sederhana. Kesepakatan itu mempunyai nilai hakiki menuju kesatuan bangsa yang benar-benar utuh dan muni. Kesepakatan tersebut tidak boleh diartikan bahwa bahasa-bahasa daerah harus dihapuskan karena eksistensi dan pemeliharaan bahasa-bahasa daerah tersebut dijamin sepenuhnya di dalam UUD 1945 (Ridwan dalam Depdikbud, 1997: 26).

Oleh sebab itu gagasan ataupun ide yang dikemukakan oleh para pemuda pada saat itu (1928) yang telah memikirkan masalah penyatuan bahasa yang digunakan

oleh seluruh suku bangsa harus dihargai dan dihormati. Gambaran integrasi nasional pun secara tidak langsung juga telah dilakukan oleh para pemuda pencetus Sumpah Pemuda 1928. Pemimpin maupun pemuda yang hadir pada saat itu adalah wakil-wakil pemuda dari berbagai suku-bangsa, seperti Jong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon dan sebagainya. Jadi, dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dimaksudkan untuk peningkatan rasa solidaritas nasional dalam rangka. Pembinaan hubungan yang erat serta untuk mencegah timbulnya konflik yang dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional (Depdibud 1997: 24).

Karena itu dalam masalah integrasi nasional ini ada 4 komponen yang merupakan kesatuan sebuah sistem yang menjadi indikator untuk keberhasilan integrasi nasional dan kerjasama golongan etnik tersebut. Keempat komponen tersebut dikenal dengan SARA yaitu suku atau etnik, agama, ras, dan antar golongan. Empat komponen ini sangat sensitif dan paling mudah menimbulkan perpecahan. Karena itu kestabilan keempat komponen ini merupakan asset bangsa yang menjadikan bangsa kita menjadi berjaya (Depdikbud, 1996: 21)

Gografis Nasional dianggap sebagai suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang besar yang tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat oleh sejarah di masa lampau dan yang bersedia dibuat di masa yang akan datang. Nasion dianggap mempunyai suatu masa lampau yang melanjutkan dirinya dalam masa kini oleh suatu kenyataan yang jelas, kesempatan, keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk terus hidup bersama. Jadi, anggota nasion Indonesia adalah orang yang menganggap dirinya sebagai orang Indonesia dalam arti yang sesungguhnya, baik jiwa maupun raganya. Mereka benar-benar meresapi dan menghayati bahwa ia benar-benar manusia Indonesia sehingga segala sesuatu yang ingin menjatuhkan nama bangsa dan negara dengan tulus ikhlas akan membela dan mempertahankannya.

Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa nasional Indonesia telah ada sebelum negara Republik Indonesia terbentuk karena solidaritas tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban warga negara seperti yang dinyatakan oleh undang-undang yang berlaku. Orang-orang yang bersama yang merupakan warga negara RI tidak

sepenuhnya sama dengan orang-orang yang bersama-sama merupakan anggota nasional Indonesia (Bachtiar dalam Depdikbud, 1997: 27).

D. Integrasi Nasional dan Kerjasama antar Golongan Etnik

Kita menyadari prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, prinsip perbedaan keragaman budaya dan bahasa serta agama, dan kesadaran itu mengharuskan kita, bahwa setiap individu, setiap kelompok etnik untuk menjaga kestabilan, keutuhan, agar bangsa kita tetap exist (Depdikbud, 1996: 21).

Integrasi nasional dan kerjasama antar golongan etnik adalah dua pengertian yang berbeda, namun keduanya mempunyai hubungan dan kaitan satu sama lainnya. Setiap bangsa yang telah berhasil menciptakan kondisi bangsa dalam sebuah integrasi nasional, maka bangsa itu akan berhasil pula menciptakan kerjasama antar kelompok etnik, tetapi perlu diingat bahwa keberhasilan kerjasama kelompok etnik bukan merupakan jaminan terciptanya integrasi nasional. Begitu pula keberhasilan terciptanya persatuan nasional sebagai suatu bangsa yang besar, bukan merupakan jaminan keberhasilan terciptanya integrasi nasional (Depdikbud, 1996: 19).

Integrasi nasional merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik itu, dari perjalanan dan pengalaman historis ini melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan sepenenderitaan. Perasaan sepenenderitaan ini yang melahirkan kesadaran terhadap identitas bangsa dan melahirkan hasrat untuk menciptakan kondisi tujuan bersama dan melahirkan negara yang merdeka (Depdikbud, 1996: 19).

E. Perwujudan Integrasi Nasional

Sehubungan dengan hal tersebut yang diinginkan dalam integrasi nasional adalah adanya kekuatan batiniah yang menggerakkan seseorang untuk ingin hidup bersatu serta adanya kesadaran dan kemauan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Untuk dapat mewujudkan integrasi nasional yang tangguh seperti yang diinginkan maka di dalam kehidupan sehari-hari harus sering mengadakan interaksi sosial di antara sesama warga yang berlainan suku, agama maupun kebudayaannya.

Akan tetapi, sebagai konsekwensinya muncul gambaran subyektif mengenai suku bangsa lain (Depdikbud, 1997: 27).

Seperti yang telah dikemukakan di depan, unsur- unsur yang terdapat di dalam setiap kebudayaan daerah itu terangkum di dalam suatu sistem nilai budaya antara lain berupa nilai moral, religi, sosial, ekonomi, pengetahuan maupun nilai seni. Masing-masing satuan unsur budaya tersebut terdapat di dalam kebudayaan daerah yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Nilai-nilai tersebut termasuk nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimiliki oleh hampir setiap suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, adanya persamaan unsur-unsur budaya tidak menjadikan masalah dalam mewujudkan integrasi nasional. Sekarang, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyatukan unsur-unsur yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa tersebut. Untuk itu agar dapat mewujudkan integrasi nasional diperlukan adanya unsur-unsur pendukung yang dapat diterima oleh setiap suku bangsa yang ada. Unsur-unsur pendukung tersebut dapat melalui pembinaan kesadaran nasional, perwujudan keadilan sosial, adanya pengawasan sosial, adanya tekanan dari luar, bahasa kesatuan, lambang kesatuan dan sebagainya (Hendropuspito dalam Depdikbud, 1997: 25).

F. Masalah Integrasi Nasional

(Koentjaraningrat dalam Depdikbud 1997: 25) menyebutkan bahwa integrasi mencakup aneka wama kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang antara lain mencakup masalah merubah prasangka etnis atau stereotipe etnik antara warga suku bangsa yang berlainan yang di dalam persaingannya mengejar kesempatan bekerja serta pendidikan yang terbatas sehingga dapat menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan. Jadi, titik berat masalah integrasi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat adalah penekanan terhadap masalah stereotipe etnik yang negatif yang dirasakan dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional. Prasangka sosial yang bersifat negatif ini akan semakin nyata dan dirasakan apabila masing-masing individu saling berinteraksi.

Masalah integrasi nasional dan kerjasama antar golongan etnik adalah merupakan masalah nasional. Masalah ini merupakan program bangsa bahwa setiap individu dan setiap golongan etnik harus menciptakan kondisi agar tercipta suatu bangsa yang utuh, rukun dan damai, sebagai sebuah kesatuan bangsa, bangsa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dan mencintai bangsa Indonesia. (Depdikbud 1996: 17).

Namun demikian perlu diingat bahwa integrasi nasional bukan berarti menghapuskan identitas lokalitas, identitas etnik, menghapuskan jati diri kelompok etnik, sebab keragaman identitas etnik merupakan asset bangsa, asset budaya bangsa yang dirumuskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang perlu dijaga adalah volume identitas etnik/jati diri kelompok ini harus lebih kecil dari kesadaran berbangsa, bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini harus dijaga, sebab kalau kesadaran lokalitas kebanggaan etnik lebih besar dan lebih dominan dari kesadaran berbangsa sebagai bangsa Indonesia maka akan berakibat fatal, dan hal ini akan melahirkan faham separatisme, sukuisme. Bahwa suku merekalah yang lebih unggul, lebih berbudaya, lebih cerdas, dan karenanya akan melahirkan anggapan bahwa suku merekalah yang pantas keluar sebagai pemimpin suku ini (Depdikbud, 1996 :17).

Kalau perasaan seperti ini dimiliki oleh golongan etnik yang lebih kecil yang mendiami suatu daerah tertentu akan melahirkan rasisme ekstrim, ingin memisahkan diri dari dominasi kelompok etnik yang lebih besar yang dianggapnya menghancurkan identitas etnik mereka (Depdikbud, 1996 :18).

Dalam kehidupan suatu suku-bangsa tertentu, seringkali dijumpai gambaran subyektif mengenai suku bangsa lain, baik yang bersifat positif maupun negatif. Akan tetapi tidak selamanya gambaran subyektif atau stereotipe etnik ini selalu merupakan gambaran yang negatif saja, melainkan ada kalanya berupa stereotipe etnik yang positif. Namun, dalam kenyataannya justru stereotipe etnik yang negatiflah yang sering muncul dan hal ini yang akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. (Depdikbud 1997:27)

(1Depdikbud, 1996:32) Secara obyektif tentu dapat dipastikan banyak kendala akan dihadapi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan integrasi maupun kesatuan

nasional khususnya dalam bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh faktor pluralitas tersebut yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pluralisme geografis

Dari kondisi geografis nusantara yang terdiri atas 12.667 pulau besar-kecil, dapat dinyatakan bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang paling terserak di muka bumi ini. Hal ini akan berpengaruh besar kepada manusia yang menghuninya.

2. Pluralitas etnik

Kenyataan yang ada ialah bahwa bangsa Indonesia terdiri ada lebih dari 300 suku dengan 50 jenis bahasa yang berbeda. Suku-suku ini hidup menyebar di Pulau-pulau yang terserak tadi, terpisah satu dengan yang lainnya sehingga kondisi semacam ini makin mempertajam keberagaman etnis.

3. Pluralitas religius

Kehidupan beragama telah mewujudkan keragaman karena disamping tetap hidupnya sistem nilai tradisional yang boleh dikatakan merupakan kepercayaan asli nusantara, masih pada hidup berkembang hampir semua agama-agama besar dunia, yakni Hindu-Budha, Islam dan Kristen. Bagaimana interelasi antara pengikut agama-agama tersebut dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk dikaji dalam kesempatan sendiri.

4. Pluralitas ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia nampaknya menunjukkan gejala pluralitas yang sama. Dipelbagai daerah nyata sekali bentuk-bentuk kehidupan ekonomi yang bervariasi mulai dari sistem huma berpindah, sistem irigasi perairan modern. Kehidupan perdagangan mulai dari sistem barter pada masyarakat tradisional pedalaman sampai pada sistem ekspor-impor modern dengan nilai tukar berupa uang.

5. Pluralitas Kekerabatan

Dibidang inipun telah menunjukkan keberagaman pula, dimana suku-suku bangsa menganut sistem patrilineal , matrilineal dan bilateral pada

kehidupan kekerabatan mereka. Hal ini telah mempengaruhi perbedaan hukum adat dan tata cara lainnya.

Problematika masyarakat majemuk seperti Indonesia merupakan konsekuensi dari perkembangan dan interaksi yang timbul. Menurut (Mangkubumi dalam Depdikbud 1997: 28), konsekuensi ini dapat direfleksikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. Harus ada nilai yang dianut oleh masyarakat yang menginginkan agar integrasi dapat diwujudkan karena konflik yang timbul sering diakibatkan oleh adanya perbedaan pada sistem nilai para penganutnya yang dapat mempengaruhi sikap dan persepsi setiap orang dalam memberikan penilaian terhadap suatu masalah, baik yang sudah lewat maupun yang akan dihadapi.
2. Karena terdiri dari berbagai suku bangsa, maka problematika yang muncul adalah sulitnya untuk menyatukan pendapat karena masing-masing manusia dipengaruhi oleh sistem nilai budaya daerahnya.
3. Sulitnya untuk menumbuhkan solidaritas sehingga akan mempersulit untuk mengembangkan kerjasama Menurut Koentjaraningrat (1993) satu-satunya yang dapat membantu mengembangkan kerjasama

Menurut Koentjaraningrat (1993) satu-satunya yang dapat membantu memecahkan suatu permasalahan adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya, konflik antar suku-bangsa merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti Indonesia ini. Konflik-konflik ini biasanya bersumber pada:

1. Adanya perbedaan sumber penghidupan/mata pencaharian
2. Adanya pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari suku bangsa yang lain.
3. Adanya fanatisme.
4. Adanya salah satu suku-bangsa yang ingin mendominasi.
5. Adanya hubungan antara suku-suku bangsa yang sudah bermusuhan secara adat.

Namun demikian, ada unsur-unsur yang dapat menyatukan, yakni: sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa konflik.

1. Jika warga suku-bangsa yang berbeda dapat saling bekerjasama secara

2. Jika warga dari dua suku-bangsa yang berbeda dapat hidup berdampingan, tanpa konflik.

Kedua unsur inilah yang menurut Koentjaraningrat dapat membantu pendukung lainnya yang antara lain berupa : pembinaan perwujudan keadilan sosial dan prinsip solidaritas, adanya kesadaran nasional pengawasan sosial luar.

Pada dasarnya, Konflik-konflik yang sering timbul sehubungan dengan masalah integrasi dapat dihindarkan apabila di dalam masing-masing jiwa individu bangsa Indonesia tertanam adanya suatu “nasional Indonesia”. Yaitu adanya rasa kesatuan solidaritas untuk ingin bersatu menjadi bangsa Indonesia yang tidak memandang adanya perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, ge maupun batas-batas alamiah tertentu (Widjaja, 1985).

G. Contoh Masalah Integrasi Bangsa

1. Masyarakat Muslim Tobelo (Ambon)



Tanggal 26 Desember 1999 saat masyarakat Islam Tobelo khususnya dan dunia Islam umumnya sedang dalam suasana ramadhan, harus dihadapi dengan deraian air mata dan tetesan darah serta gemilang bingkai-bingkai tak berdosa. Tidak hanya Tobelo, tapi juga Galela, Jailolo/ Sidangoli, Sahu, Ibu, dan beberapa kecamatan di kawasan Halmahera serempak pecah dengan amuk rusuh yang sama.

Derita ini justru dari bumi Halmahera Utara yang selama ini dikenal; sangat akrab dengan ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam nilai adat-budaya Hibualamo (Ahmad,2000: 139).

Penyebab:

Ribuan tahun yang lalu, saat Hibualamo dirancang sebagai sebuah perekat kehidupan harmonisasi dan menjadi nilai budaya yang humanis oleh pemilik Halu (para leluhur) yang telah memiliki pandangan yang sangat universal karena di generasi mendatang Hibualamo akan diisi oleh berbagai etnis, dan terbukti dengan melajunya berbagai etnik di Tobelo dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Halmahera Utara maupun di Maluku Utara. Namun semua berubah saat terjadi gesekan dan perubahan orientasi dengan tumbuh suburnya konflik horisontal ditingkat bawah yang berubah menjadi amuk rusuh berbau agama dan etnik yang melanda di berbagai daerah seperti Kupang, Ambon, Sambas, dan termasuk Kao-Malifut. Ini membuat Tobelo mulai berbenah dengan melahirkan Pemangku Dewan Adat Hibualamo, lalu terbentuknya wadah Generasi Muda Hibualamo (GEMAIHILO) sebagai upaya untuk menjembatani aspirasi muda di wilayah Tobelo dan sekotarya (Ahmad,2000: 140).

Namun berbagai amuk rusuh diberbagai daerah dan mulai muncul bibit-bibit saling curiga. Di Tobelo mulai terbangun suatu persepsi antara masyarakat Islam dan Kristen untuk saling membangun kecurigaan dengan bentuk isu-isu dan berbagai bentuk persaingan yang bersifat sporadis. Selanjutnya dendam yang berurat akar, segelintir oknum tak bermal juga menjadi kayu api dan meniup aroma pembalasan dendam (Ahmad,2000: 141).

Solusinya:

Ada banyak upaya yang dilakukan untuk menangkal isu amuk rusuh serta memperkuat ikaatan kekeluargaan di Hibualamo, yakni dengan kelahiran Pemangku Dewan Adat Hibualamo, lalu terbentuknya wadah Generasi Muda Hibualamo (GEMAIHILO) sebagai upaya untuk menjembatani aspirasi muda di wilayah Tobelo dan sekotarya (Ahmad,2000: 140). Namun pembentukkan embaga adat, GEMAIHILO maupun Soidaritas hanyaah sebuah kamufalse dari rencana besar untuk sebuah kepentingan. Maka dari itu saatnya dibangun budaya transformatif yang lebih konkret dan tahan uji oleh perubahan serta sesuai dengan ucapan dan tindakan. Dan

cara terbaik ialah kita kembali kepada nilai ajaran agama kita masing-masing (Ahmad,2000: 143).

2. Gerakan papua merdeka (Free West Papua)



Kondisi ketidak merataan infrastruktur serta ketimpangan pembangunan yang tidak merata di tengah-tengah sumber daya alam yang melimpah di tana Papua membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kelompok perlawanan dan membuat suatu gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdek (OPM) yang memiliki visi untuk mendrikan Negara Papua Barat terpisah dari NKRI (Mishael, Setiyono, dan Hardiwinoto, 2016:2). Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua.

Penyebabnya:

Salah satu faktor pemicu konflik di Papua Barat adalah perbedaan interpretasi masuknya Papua Barat ke dalam NKRI. Menurut OPM (Operasi Papua Merdeka), masuknya Papua Barat telah mencapai kemerdekaanya pada tanggal 1 Desember 1961 yang dideklarasikan oleh New Guinea Raad. OPM membuat berbagai masalah dan propaganda untuk melawan pemerintah. Pemerintah melaksanakan Operasi Militer untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Selain itu juga tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York, kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata ditengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia (Mishael, Setiyono, dan Hardiwinoto, 2016:1).

Solusinya:

Gerakan Papua merdeka menjadi bukti bahwa belum terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Kejadian ini merupakan kesalahan kita sebagai bangsa yang selama ini tidak pernah memiliki perhatian serius terhadap wilayah bagian timur Indonesia. Kebijakan elite politik yang hanya berorientasi untuk sekadar meningkatkan infrastruktur di Ibukota adalah telah menjadi kesalahan dalam mengelola suatu bangsa. Keadilan belum pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, saat ini yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintah bisa lebih proaktif untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua bila ada kemauan politik ke sana (Mishael, Setiyono, dan Hardiwinoto, 2016:12).

3. Kerusuhan Mataram/ NTB

Kerusuhan yang terjadi di Mataram dan kawasan sekitarnya di Pulau Lombok pada 17 Januari 2000, yang dikenal juga dengan “Peristiwa 171”. Para pelaku yang bernaung SARA ini melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah rumah ibadah kaum Nasrani di hari pertama, yang kemudian berkembang menjadi aksi penjarahan dan perusakan tempat-tempat bisnis dan wisata pada hari berikutnya. Akibatnya banyak kelompok Nasrani maupun pihak investor serta pelaku bisnis lainnya meninggalkan Pulau Lombok, dan ini tidak hanya terjadi di kota Mataram, tetapi juga di wisata Senggigi. Sehingga terjadi eksodus besar-besaran dari para wisatawan asing ke Pulau Bali menyebabkan mandegnya kegiatan bisnis serta menurunnya pemasukan pemda dari sektor pariwisata (Sihbudi dan Nurhasim, 2001: 101-102)



Penyebab:

Menurut pandangan narasumber dari kalangan Islam dan Kristen, Peristiwa 171 merupakan hasil rekayasa dari suatu kekuatan yang memiliki kemampuan yang sangat canggih. Mereka memang tidak secara eksplisit menuduh aparat kepolisian atau militer. Tetapi secara implisit tuduhan itu tampaknya diarahkan ke oknum-oknum ditubuh aparat. Sebagai contoh, para perusuh berhasil mengidentifikasi dengan sangat tepat setiap rumah milik kaum Kristiani, padahal tempat tinggal kaum Kristiani sudah membur dengan pemukiman kaum Muslim. Selain itu juga, alasannya adalah karena terbakarnya sebuah gereja besar yang justru di dekat Makodim. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan karena sebenarnya wilayah tersebut menjadi tugas pihak kepolisian. Dari banyak kegagalan pada peristiwa tersebut semakin memperkuat dugaan adanya pihak militer yang sengaja bermain di dalam aksi “Peristiwa 171” (Sihbudi dan Nurhasim, 2001: 136-137).

Solusi:

Meskipun kejadian tersebut hanya berlangsung selama 8 jam dan pasca kejadian tersebut kehidupan sehari-hari berjalan dengan normal namun potensi konflik sosial-politik masih kemungkinan dapat terjadi. Maka dari itu guna mencegah terulangnya kembali Peristiwa 171, sebaiknya jalur informasi dan komunikasi di buka secara langsung antara masyarakat dan pejabat, baik sipil maupun militer. Dengan demikian, masyarakat bawah tidak akan mudah terpancing oleh isu ataupun kabar burung yang memancing emosi massa (Sihbudi dan Nurhasim, 2001: 139).

4. Konflik etnis Tionghoa dan pribumi (1998)



Masalah integrasi, khususnya dari warga etnis Tionghoa kelahiran Indonesia dengan warga etnis lainnya yang sering diistilahkan sebagai “warga asli”, seperti yang terjadi di kota Medan dan sekitarnya

(1994 dan 1998), Jakarta, Solo, Surabaya (1998) yang diiringi dengan tindak kekerasan dan perampasan sebagian harta benda dari para warga etnis Tionghoa, telah menghiasi lembaran sejarah perjalanan bangsa kita (Rahz, dkk 1999: 143).

Penyebabnya:

Konsep penduduk asli, yang untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam masa penjajahan, pada masa kini sudah berurat-berakar. Penduduk asli berarti mereka yang telah menduduki tanah sebelum penjajahan oleh bangsa Barat. Kelompok-kelompok penduduk asli tersebut menganggap diri mereka



sebagai bumiputera dan oleh karenanya mereka menikmati hak-hak yang lebih

ketimbang pendatang baru, yaitu kelompok-kelompok imigran. Semua suku Indonesia dianggap kelompok penduduk asli dan etnik Tionghoa yang merupakan kelompok migran. Istilah tersebut digunakan juga untuk orang Indonesia penduduk asli tertentu yang bertransmigrasi dari wilayah lain Indonesia. Transmigran penduduk asli tersebut dianggap sebagai nonpenduduk asli oleh penduduk setempat, dan oleh karenanya mereka terkena diskriminasi sosial. Namun hal utama yang mengakibatkan peristiwa ini ialah karena kesenjangan ekonomi antara kaum pribumi dan etnis Tionghoa yang menimbulkan kecemburuan terhadap kaum pribumi. Karena sektor ekonomi yang banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa (Rahz, dkk 1999: 141).

Solusinya:

Banyak kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh dari warga etnis Tionghoa sendiri untuk mensukseskan integrasi. Pada tahun 1966 pemerintah menerbitkan peraturan No. 127/U/Kep/12/1966 tentang cara penggantian nama para warga etnis Tionghoa dengan nama Indonesia. Alasannya untuk mempercepat proses asimilasi karena dengan menyebut nama Indonesia, “warga asli” merasa tidak “asing” lagi (Rahz, dkk 1999: 144).

5. Konflik Aceh (1989-1998)



Penyebabnya:

Diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi militer (DOM) selama kurun waktu 10 tahun yakni 1989 hingga 1998, telah banyak menimbulkan eksese negatif dalam berbagai

sektor kehidupan rakyat di Aceh. Eksese negatif termaksud diantaranya adalah berjatuhnya korban pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap rakyat sipil

yang tidak bersalah, kemudian melemahnya pemerintahan sipil di Aceh. Penetapan Aceh menjadi wilayah operasi militer tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh para petinggi baik sipil maupun militer di Jakarta waktu itu, yang notabene Orde Baru memiliki kekuasaan mutlak (Rahz, dkk 1999: 230).

Solusinya:

Seiring dengan tumbangny pemerintah orde baru, biasanya turut terasakaan sampai ke Aceh, dimana menguatnya gerakan mahasiswa, LSM dan seluruh komponen masyarakat mencabut status Daerah Operasi Militer dari Aceh. Pada tanggal 7 Agustus 1998 dicabutlah status Aceh dari status Daerah Operasi Militer (DOM) (Rahz, dkk 1999: 238).

6. Kerusuhan Kupang



Kerusuhan di Kupang dengan berbagai aksinya seperti pelemparan, perusakan dan pembakaran terjadi selama kurang lebih 8 jam yakni pada tanggal 30 November 1998. Pada awalnya, masyarakat Kristen Kupang NTT melaksa

nakan aksi perkabungan atas berbagai peristiwa di tanah air dengan mengungkapkan rasa keprihatinan tragedi pertikaian antara umat Islam dan Kristen di Ketapang yang diprakarsai oleh GAMKI, NTT, GMKI Kupang, PMKRI Kupang, Pemudak Katolik NTT, dan mahasiswa di Kupang. Pada pukul 09.00 WITA, mulai terjadi penyimpangan dengan adanya kegiatan pawai keliling yang dilakukan oleh pemuda yang berujung kepada tawuran antara pemuda Kristen dan Islam di berbagai titik di daerah di Kupang seperti Gereja, Masjid, universitas, dan bahkan kios-kios suku Bugis yang dijarah (Sihbudi dan Nurhasim, 2001: 69).

Penyebab:

Perkembangan wilayah Kupang yang merupakan tempat dan titik temu bagi perkembangan etnik dan agama, dengan demikian memberikan andil bagi sumbu konflik di sana. Apalagi konflik itu diperparah dengan tingkat kesenjangan diantaranya. Tingkat kesenjangan antara penduduk pendatang dan penduduk asli makin menganga karena ketidakampuan penduduk asli beradaptasi dengan lingkungan mereka secara kompetitif, selain itu juga dipengaruhi oleh kesenjangan dan kecemburuan ekonomi antara penduduk pendatang dan penduduk asli yang dimana lebih dari 2/3 lebih penduduk NTT secara umum dan Kodya Kupang tergolong sebagai penduduk miskin alamiah (akibat faktor alam). Disisi lain, kemiskinan alamiah diperparah oleh modal berkembangnya kemiskinan struktural di masa orde baru, karena penduduk kecil, rakyat umum di marginalisasikan dalam proses ekonomi daerah. Kesenjangan ekonomi ini menimbulkan gangguan psiko-sosial dalam interaksi antara pendatang dan penduduk asli. Penduduk asli yang tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan perkembangan sosial ekonomi, seringkali menggunakan pertahanan diri engan menggunakan komunikasi tertentu, misalnya dengan kekerasan, ancaman, penggunaan konsep *in-group* dan *out-group* untuk dapat melakukan tawar menawar (*bargaining*) dengan pihak mendatan (Sihbudi dan Nurhasim, 2001: 71-72).

Solusi:

Sumber utama konflik di Kupang adalah karena kecemburuan sosial akibat terpinggirkannya penduduk asli. Sutu kebetulan bahwa sumber ekonomi itu dikuasai oleh kelompok beragama Islam, oleh karena itu maka kerusuhan di Kupang cepat mereda, tidak meluas, dan berlarut-larut. Meskipun demikian, bila akar utama ini tidak segera diselesaikan akan timbul konflik dikemudian hari. (Sihbudi dan Nurhasim, 2001: 100).

Untuk itu perlu dipikirkan suatu cara transformasi sosial yang bersifat menjaga keseimbangan simbolik dalam masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat secara

nasional hendaknya merupakan program yang tidak “bias etnik” tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek etnik, suku, maupun agama didalamnya agar tidak terjadi kesenjangan struktural dan kultural yang pada tahap tertentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik (Sihbudi dan Nurhasim, 2001: 223).

Soal Latihan

1. Secara etimologi, integrasi terbentuk dari bahasa latin yaitu “*integrare*” yang artinya adalah
 - a. Memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan
 - b. Memberi tempat bagi sekelompok unsur demi suatu kebersamaan
 - c. Memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu kebersamaan
 - d. Memberi tempat bagi sekelompok unsur demi suatu keseluruhan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi kelompok masyarakat adalah
 - a. Komunikasi, persukuan, kesamaan, budaya
 - b. Komunikasi, solidaritas kelompok, budaya, agama, daya tampung sosial
 - c. Komunikasi, solidaritas kesukuan, lingkungan, teknologi
 - d. Komunikasi, primordialisme budaya, agama, daya tampung sosial

3. Persatuan yang tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik, dari perjalanan dan pengalaman historis. Merupakan bentuk dari integrasi
 - a. Politik
 - b. Budaya
 - c. Ekonomi
 - d. Nasional

4. Bangsa Indonesia terdiri dari lebih 300 suku dengan jenis bahasa yang berbeda-beda. Hal ini merupakan bentuk dari pluralitas
 - a. Religius

- b. Etnik
 - c. Geografi
 - d. Kekerabatan
5. Konflik-konflik yang sering muncul sehubungan dengan masalah integrasi dapat dihindarkan apabila masing-masing individu mempunyai rasa
- a. Primordialisme
 - b. Intoleran
 - c. Kesadaran solidaritas
 - d. Acuh tak acuh

Daftar Pustaka

- Ahmad, Kasman Hi dan Oesman, Herman. 2000. *Damai Yang terkoyak: Catatan Kelam dari Bumi Halmahera*. Aceh: Madani Press
- Kemendikbud, (1996). *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kemendikbud
- Kemendikbud, (1996). *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya*. Semarang: Kemendikbud
- Kemendikbud, (1997). *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kemendikbud
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press
- Mishael Georgy, dan Setiyono Joko, dan Hardiwinoto Soekotjo. 2016. *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional: Jurnal Vol 5 No 2*
- Rahz, Muhammad Hidayat dkk. 1999. *Menuju Masyarakat Terbuka: Lacak Jejak Pembaruan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Ashoka Indonesia
- Sihbudi, Riza dan Nurhasim Moch. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo